



IDLO International Development Law Organization
Organisation Internationale de Droit du Développement



PEREMPUAN DAN INTEGRITAS DALAM MEMIMPIN

JSU mengenai peran publik perempuan masih merupakan isu hangat dan sentral baik secara lokal maupun secara nasional pada dekade terakhir ini. Persoalan tersebut masih sangat serius diperdebatkan oleh masyarakat baik secara ilmiah maupun debat kusir. Khusus di ranah publik di Aceh, isu perempuan bisa dikatakan timbul tenggelam. Sebelum konflik memuncak di Aceh isu perempuan sempat naik, dan isu ini sempat pula nyaris hilang, ketika konflik memuncak di Aceh pada tahun 2003 lalu namun isu ini kembali muncul pasca konflik dan pasca bencana di Aceh.

Pasca konflik dan bencana di Aceh, isu peran perempuan meningkat, akibat banyaknya jumlah perempuan yang harus bisa hidup mandiri, setelah ditinggal suami, yang meninggal menjadi korban. Akibat kondisi ini, banyak perempuan yang harus menjadi orangtua tunggal bagi anaknya. Hal yang sama juga kemudian terjadi karena bencana tsunami. Ada banyak perempuan yang harus bisa berjuang dan bertahan untuk memulai kehidupannya kembali setelah kehilangan segala-galanya.

Untuk kondisi ini, perempuan dituntut untuk bisa memahami kenyataan, selain bisa memahami kondisi dirinya sendiri, dia juga harus bisa memahami kenyataan di sekelilingnya. Secara tidak langsung, di sini perempuan dituntut untuk bisa menjadi pemimpin, terutama bagi dirinya sendiri.

Selain menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, perempuan juga dimungkinkan untuk bisa menjadi pemimpin di komunitasnya. Hal ini terjadi karena desakan kebutuhan.

Namun, sedikit disayangkan, dalam kenyataannya tidak banyak perempuan yang kemudian mau dan bisa muncul menjadi pemimpin. Tasmia Emsa, Sekretaris Eksekutif Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA), mengatakan, minimnya keterlibatan perempuan lebih banyak disebabkan oleh kurangnya upaya mempersiapkan perempuan sebagai mitra kerja sejak dini.

Budaya patriarki yang terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, membuat kedudukan perempuan menjadi terpinggirkan. Akibatnya, kualitas dari perempuan pun menjadi rendah. Diakui atau tidak akibat kualitas rendah inilah keberadaan perempuan pada posisi-posisi puncak dari sebuah komunitas, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, selalu ada pada angka kecil, atau bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali, sehingga sangat diperlukan adanya kerjasama yang kuat antara laki-laki dan perempuan, untuk meningkatkan kualitasnya.

Kepemimpinan perempuan secara normatif memiliki legitimasi yang sangat kuat, baik secara teologis, filosofis maupun hukum. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, menyebutkan sejumlah pasal yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pemimpin maupun menjadi pemimpin.

Begitu juga dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 (UU No 39/1999) dan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, telah memberikan jaminan bahwa perempuan terbebas dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif (pasal 46). Selain itu, Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengharuskan seluruh kebijakan dan Program Pembangunan Nasional dirancang dengan perspektif gender.

Namun dalam tataran realitas masih mengalami banyak tantangan dan hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Sekedar contoh, masih segar dalam

ingatan kita adalah kenyataan yang paling baru yang dirasakan di dalam tatanan pemerintahan Aceh, misalnya, sebut Tasmia Emsa. Dari hasil seleksi yang dilakukan oleh tim pemerintahan Irwandi untuk menajaring pemimpin eselon dua yang berkualitas, ternyata tidak satu pun perempuan yang berhasil lulus dengan kualifikasi yang ditetapkan. Dan kondisi ini sebut Mia, merupakan kondisi terburuk, dimana kualitas kepemimpinan perempuan di Aceh belum seperti yang diharapkan.

Mengenal Hambatan yang Multi dimensi

Budaya masyarakat yang bersumber dari tradisi telah berlangsung secara turun temurun menempatkan peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, dan mengakibatkan akses dan partisipasi perempuan dalam dunia di luar sektor domestik, menjadi sangat rendah. Konsekuensi yang terjadi kemudian, sangat logis kalau ranah luar domestik, seperti pemerintahan dan politik hingga saat ini masih patriarkhis, laki-laki mendominasi secara luas arena politik, termasuk di dalamnya memformulasikan aturan-aturan dan standar permainan politik yang menihilkan kepentingan perempuan, yang harus puas menjadi kelompok minoritas.

Begitu juga budaya masyarakat yang bersumber dari pemahaman agama, khususnya di tingkat lokal turut menjadi faktor yang menghambat lajunya kepemimpinan perempuan. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi NAD, Raihan Putri mengatakan, bahwa Islam, selaku agama mayoritas yang dianut masyarakat menghendaki agar kaum perempuan dapat mengetahui hak dan kewajibannya, memahami tuntunan Islam dengan sempurna, cara-cara mendidik yang baik, melaksanakan mu'amalah dengan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa, bersikap dan bekerja sesuai dengan kodrat kewanitaannya sehingga dapat mengantar mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Jadi, sebut Raihan, tidak ada larangan untuk perempuan, melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya mu'amalah dalam wujud profesi apapun, selama perempuan tersebut bisa mencerminkan kepribadian Islam dan benar-benar menyadari akan ajaran Islam, sehingga orang akan menghormatinya dalam berkarir, karena dia memiliki etika yang baik sebagai aplikasi dari akhlakul karimah.

Selain itu, menurut Raihan Putri, ada beberapa hal, yang selama ini selalu menjadi kendala, mengapa kaum perempuan selalu berada di belakang dalam soal kepemimpinan. Pertama, adalah masih minimnya kualitas kemampuan manajerial. Dari tinjauan sejarah, Aceh tidak mempermalahkan tentang keberadaan seorang pemimpin perempuan, karena dalam beberapa periode, Aceh pernah dipimpin oleh beberapa orang ratu. Perempuan juga diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana laki-laki, dan perempuan pun memiliki konsekuensi mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dipimpinnya di hadapan Allah swt. Jadi, kemampuan manajerial dalam diri seorang perempuan, mutlak harus dimiliki, sekalipun dirinya hanya menjadi seorang ibu rumah tangga.

Kedua, adalah kecerdasan. Ada tiga tingkat kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang perempuan, sehingga bisa membentuk jiwa kepemimpinan yang baik, yaitu :

- Kecerdasan spiritual dan kepribadian : Sifat-sifat mulia dalam diri harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah realita, bukan hanya sebagai cita-cita idealis saja.

Taswara, 2001, dalam bukunya berjudul Kecerdasan Ruhaniah,

menuliskan bahwa salah satu indikasi potensi kecerdasan ruhaniah, adalah cara seseorang memberikan makna terhadap hidup yang dijalannya. Makna hidup adalah cara seseorang untuk mengisi kehidupannya yang menunjukkan arah dalam cara manusia berhubungan dengan dirinya sendiri, orang lain dan alam sekitarnya. Komitmen dimaksud berkaitan erat dengan masalah yang sangat prinsipil yakni mampu memberi manfaat kepada orang lain dengan aktualisasi sikap saling menghargai, saling menghormati, saling membantu dan tidak suka mencari kelemahan orang lain.

- Kecerdasan otak : Ini diperlukan agar bisa melahirkan ide-ide cemerlang bagi peningkatan mutu terkait dengan hal-hal di sekelilingnya.
- Kecerdasan emosional: kecerdasan emosional akan tercermin dalam keikhlasan dan kejujuran nurani.

Dengan memiliki beberapa kemampuan tersebut, perempuan bisa melakukan berbagai peran di ranah publik dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut. Dengan kata lain bahwa kedudukan perempuan dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati perempuan sebagai sebuah keniscayaan.

Mewujudkan Potensi Diri Perempuan

Sesungguhnya kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang marak didengungkan selama ini diilhami dari ajaran Islam. Kiprah perempuan ke depan haruslah tertumpu pada pemberdayaan intelektual untuk menampilkan kualitas sesuai dengan yang diinginkan, sehingga jika sumber daya perempuan dimanfaatkan, maka ini akan menjadi potensi kekuatan masyarakat yang luar biasa, yang akan menjadi kenyataan.

Memasuki abad ke 21 ini, sebagian orang mulai berani mengatakan, bahwa abad ini adalah abad kebangkitan perempuan. Begitu pula halnya dengan kenyataan di Aceh. seharusnya, fase pasca konflik dan pasca bencana tsunami, adalah fase dimana kaum perempuan Aceh bangkit kembali dari keterpurukannya. Kondisi yang harus dipersiapkan adalah pemberdayaan sikap mandiri dan cerdas, sehingga potensi yang dimiliki bisa berkembang seoptimal mungkin.

Dengan tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, pemberdayaan memang mutlak dibutuhkan, supaya memiliki kualitas bermasyarakat dan berkeluarga yang optimal. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan, di antaranya:

- Melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal
- Terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan.
- Berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri, memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah.

Pesatnya arus informasi saat ini, mengharuskan perempuan memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karir di luar rumah, termasuk amal mu'amalah dengan tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan.

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>